

ANALISIS PERAN MAHASISWA DALAM MELAWAN DISINFORMASI POLITIK DI ERA DEMOKRASI DIGITAL

Berliana Sihombing¹, Rika Chintia Sihombing², Najwah Laras Celia³, Novellyn Debora Sitorus⁴, Annisa Seftiawaty Damanik⁵, Cristine Fitta Homasan Sinaga⁶, Lismawati Junifarta⁷, Prini desima evawani ambarita⁸

Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar

E-mail: *berlianasihombing16@gmail.com¹

ABSTRAK

Era digital membawa perubahan besar dalam dinamika politik, termasuk maraknya hoaks dan disinformasi menjelang Pemilu 2024. Mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan sosial dalam melawan disinformasi melalui literasi digital, kampanye anti-hoaks, dan konten edukatif. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penggerak opini publik yang kritis. Dukungan institusional dan kurikulum literasi digital diperlukan untuk memperkuat peran ini secara berkelanjutan.

Kata kunci

Mahasiswa, Disinformasi Politik, Literasi Digital, Hoaks, Demokrasi Digital

ABSTRACT

The digital era has reshaped politics, with hoaxes and disinformation rising ahead of the 2024 election. University students play a key role in countering disinformation through digital literacy, anti-hoax campaigns, and educational content. Using a qualitative descriptive method, this study finds that students act not only as information users but also as social change agents. Institutional support and digital literacy in education are essential to strengthen this role.

Keywords

University Students, Political Disinformation, Digital Literacy, Hoax, Digital Democracy

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Kemajuan ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Di satu sisi, media digital menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik dan mengekspresikan pendapat secara bebas. Platform seperti media sosial menjadi wadah yang memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga membuka celah bagi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, yang dikenal dengan istilah disinformasi, yakni informasi yang disebarkan secara sengaja untuk memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak etis.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi bagian penting dari perkembangan teknologi informasi. Literasi digital mencakup kemampuan seseorang dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak di ruang digital. Keterampilan ini sangat penting, terutama dalam menghadapi arus informasi yang tidak seluruhnya benar dan akurat. Salah satu tantangan nyata di era digital adalah maraknya penyebaran hoaks, yaitu berita palsu yang sering kali dikaitkan dengan isu-isu sensitif, termasuk isu politik. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadikan hoaks sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi.

Fenomena ini semakin menguat menjelang tahun politik 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi meningkat secara signifikan, khususnya melalui media sosial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menunjukkan bahwa hingga Mei 2023, terdapat lebih dari 11.642 konten hoaks yang teridentifikasi, dan sebagian besar di antaranya berkaitan dengan isu politik dan pemilu (Kominfo, 2023, dikutip dari Kumparan, 23 Oktober 2023). Menariknya, disinformasi ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kelompok pemilih muda yang secara aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan besar yang harus dihadapi generasi muda dalam memilah dan memahami informasi yang beredar di ruang digital.

Dalam situasi seperti ini, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis dalam upaya melawan disinformasi politik. Sebagai kelompok terdidik yang memiliki akses terhadap berbagai sumber pengetahuan dan pelatihan berpikir kritis, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran literasi digital di tengah masyarakat. Penelitian Ardea Widiyanto Ari Hidayat dari Universitas Negeri Malang (2024) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara literasi digital dan efikasi politik mahasiswa dengan perilaku memilih yang rasional dan kritis. Hasil penelitiannya terhadap 444 responden membuktikan bahwa mahasiswa dengan literasi digital tinggi tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu, serta lebih mampu membedakan fakta dan opini dalam isu-isu politik (Hidayat, 2024: 7). Senada dengan itu, kajian yang dilakukan oleh Dwi Setiani dan tim dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2022) mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki potensi sebagai agen perubahan dalam memerangi disinformasi. Mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu membandingkan berbagai sumber informasi, serta mampu berkomunikasi secara etis di ruang digital. Mahasiswa bahkan turut aktif mengedukasi masyarakat di sekitarnya, baik melalui media sosial maupun forum-forum diskusi, agar tidak mudah terpengaruh oleh isu politik yang menyesatkan (Setiani, 2022: 54). Aktivisme ini mencerminkan peran mahasiswa yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentuk masyarakat yang sadar informasi.

Gerakan konkret mahasiswa dalam melawan hoaks politik juga tampak dari inisiatif yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom pada November 2023. Mereka mengadakan diskusi publik dan deklarasi anti-hoaks menjelang Pemilu 2024. Dalam kegiatan tersebut, mereka menekankan pentingnya membangun budaya cek fakta dan memperkuat literasi politik masyarakat. Langkah ini sangat relevan mengingat lebih dari 55 persen pemilih Indonesia merupakan generasi muda (HIVE Telkom University, 15 November 2023). Gerakan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa tidak hanya menyadari tantangan informasi yang dihadapi, tetapi juga mampu bertindak sebagai pelopor perubahan sosial di era digital.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tidak sekadar menjadi objek informasi dalam arus media digital, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pelawan disinformasi yang aktif. Melalui penguasaan literasi digital yang baik, sikap kritis terhadap informasi, serta partisipasi aktif dalam edukasi publik, mahasiswa memiliki peran vital dalam menjaga kualitas demokrasi digital Indonesia. Kehadiran mereka menjadi kunci dalam memutus rantai penyebaran hoaks politik dan membangun ruang informasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Peran mahasiswa dalam menghadapi disinformasi politik tidak hanya terbatas pada konsumsi dan seleksi informasi yang mereka terima, tetapi juga menyangkut

kontribusi aktif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat digital. Mahasiswa memiliki keunggulan strategis karena berada dalam lingkungan akademik yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, reflektif, dan analitis. Kemampuan ini menjadi modal penting dalam menghadapi konten-konten bermuatan hoaks, terutama ketika informasi tersebut diselipkan dalam narasi politik yang terkesan sah namun mengandung bias atau manipulasi fakta. Lebih jauh, mahasiswa dapat memanfaatkan ruang-ruang digital secara kreatif dan produktif untuk melawan narasi disinformasi. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast, mereka bisa menyampaikan konten edukatif yang menyasar kelompok sebaya dengan bahasa yang lebih ringan namun tetap informatif. Konten-konten semacam ini sangat dibutuhkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang cenderung pasif terhadap berita politik arus utama, tetapi sangat aktif di media sosial.

Dalam konteks kelembagaan, peran organisasi mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) juga bisa dioptimalkan. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, pelatihan cek fakta, hingga kolaborasi dengan lembaga independen seperti MAFINDO atau Cekfakta.com untuk mengedukasi sivitas kampus maupun masyarakat umum. Hal ini tidak hanya memperkuat kapabilitas mahasiswa secara individu, tetapi juga mendorong gerakan kolektif dalam menciptakan literasi digital yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan literasi digital juga penting dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi secara lebih sistematis. Melalui mata kuliah terkait media, komunikasi, atau pendidikan kewarganegaraan digital, mahasiswa dapat dilatih untuk memahami dampak disinformasi terhadap demokrasi, sekaligus dilengkapi dengan keterampilan praktis untuk menanganinya. Upaya ini sejalan dengan visi pendidikan tinggi yang tidak hanya mencetak lulusan cerdas, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Fenomena hoaks politik bukanlah isu yang bisa dianggap remeh. Ketika opini publik terbentuk dari informasi palsu, maka keputusan-keputusan politik yang lahir pun berpotensi menyimpang dari nilai-nilai demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, keterlibatan mahasiswa sebagai pelawan disinformasi merupakan langkah penting dalam menjaga integritas sistem politik di era digital.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran mahasiswa dalam melawan hoaks politik melalui penguatan literasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi keberlangsungan demokrasi. Mahasiswa adalah garda depan yang tidak hanya berdaya secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen kebenaran di tengah maraknya informasi palsu. Ketika mahasiswa bergerak, maka masyarakat tercerahkan, dan ketika masyarakat tercerahkan, demokrasi akan terjaga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran mahasiswa dalam melawan disinformasi politik di era demokrasi digital. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkap makna, proses, serta pandangan subjek secara natural dan kontekstual, sehingga sangat relevan dalam mengkaji tindakan dan strategi mahasiswa dalam menghadapi disinformasi. Menurut Sugiyono (2021: 9), metode deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yang mencakup jurnal ilmiah, berita daring, laporan institusi, serta hasil penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir yang relevan dengan topik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen yang berisi informasi empiris mengenai aktivitas mahasiswa dalam literasi digital, kampanye anti-hoaks, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan politik digital. Sumber data utama berasal dari artikel jurnal, laporan lembaga pemerintah (seperti Kominfo dan BNPT), dan media berita daring yang terpercaya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan memfokuskan pada isi pesan, strategi yang digunakan mahasiswa, dan bentuk partisipasi digital yang mereka lakukan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kategori, serta narasi umum yang mencerminkan keterlibatan mahasiswa dalam melawan disinformasi politik.

Pendekatan kualitatif deskriptif seperti ini dinilai mampu memberikan gambaran yang kaya dan holistik terhadap fenomena sosial yang kompleks. Hal ini sesuai dengan pandangan Moleong (2019: 6), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan mengedepankan makna, konteks, dan pengalaman subjektif mereka. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya berupaya menggambarkan fakta, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik perilaku mahasiswa dalam ruang digital-politik. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana mahasiswa mengambil peran sebagai agen literasi informasi, sekaligus sebagai penyeimbang narasi politik yang berkembang di media digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebaran hoaks dalam pemungutan suara pilpres (pemilu presiden) 2024.

Hoaks merupakan salah satu bentuk informasi yang bersifat menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Nurgiansah (2020:15), hoaks adalah informasi yang dibuat secara palsu atau direkayasa dengan tujuan menutupi informasi yang sebenarnya. Informasi ini sering kali dimanipulasi sedemikian rupa hingga terlihat seolah-olah benar, padahal kenyataannya telah memutarbalikkan fakta yang ada. Selain itu, informasi hoaks biasanya tidak dapat diverifikasi sumber atau asal usulnya, sehingga menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman di masyarakat.

Sementara itu, Irhamdika (2022:47) menyatakan bahwa hoaks merupakan informasi yang belum pasti kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataan. Hoaks tidak hanya terbatas dalam bentuk media audio atau tulisan, tetapi juga dapat berupa tindakan atau perbuatan yang mampu menyesatkan orang lain. Menariknya, secara etimologis, kata "hoaks" berasal dari istilah "Hocus Pocus" yang digunakan oleh para penyihir pada masa lampau untuk menipu orang-orang, sehingga menunjukkan bahwa hoaks pada dasarnya adalah bentuk dari penipuan atau ilusi yang dimaksudkan untuk mengelabui.

Dengan demikian, hoaks dapat dipahami sebagai segala bentuk informasi palsu, baik dalam wujud teks, suara, gambar, maupun tindakan, yang dibuat dan disebarluaskan dengan tujuan menyesatkan, mempengaruhi opini, atau bahkan merugikan pihak tertentu. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilu di era digital adalah

maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi politik yang dapat memengaruhi opini publik secara masif. Ruang digital menjadi medan strategis bagi berbagai pihak untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar, terutama menjelang momen-momen krusial seperti kampanye politik. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), secara aktif mengambil peran dalam memantau dan menangani peredaran informasi hoaks yang berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi.

Dalam Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024 yang dirilis pada Rabu, 3 Januari 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan telah melakukan berbagai langkah konkret dalam menangani persebaran isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak 2024. Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa hingga tanggal 2 Januari 2024, pihaknya telah mengidentifikasi dan menangani 203 isu hoaks yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilu. Secara keseluruhan, hoaks-hoaks tersebut tersebar dalam 2.882 konten digital di berbagai platform media sosial. Rincian distribusi konten hoaks tersebut mencakup 1.325 konten di Facebook, 947 konten di X (Twitter), 198 konten di Instagram, 342 konten di TikTok, 36 konten di Snack Video, dan 34 konten di YouTube. Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik sangat masif dan terjadi di hampir seluruh saluran digital yang digunakan masyarakat.

Dari jumlah total konten hoaks tersebut, sebanyak 1.399 konten telah diajukan untuk proses take down oleh Kementerian Kominfo, dan sisanya sebanyak 1.483 konten masih dalam proses tindak lanjut. Penanganan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam menjaga kualitas informasi di ruang digital, khususnya menjelang Pemilu 2024. Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 saja, telah tercatat 189 isu hoaks yang berkaitan dengan Pemilu. Peningkatan paling signifikan terjadi dalam rentang waktu November hingga Desember 2023, seiring dengan dimulainya masa kampanye resmi Pemilu 2024. Hal ini memperkuat dugaan bahwa masa kampanye kerap menjadi momen rawan munculnya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat dan mencederai proses demokrasi. Sebagai bentuk imbauan kepada publik, terutama para kontestan dan pendukung politik, Menkominfo mengajak semua pihak untuk turut menjaga ruang digital tetap aman, nyaman, dan bebas dari hoaks, serta bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 yang damai dan bermartabat.

3.2 Media sosial ikut berperan dalam memberikan informasi palsu pada pemungutan suara pilpres (pemilu presiden) 2024.

Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan laporan Data Reportal tahun 2023, tercatat sekitar 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, dengan 153 juta di antaranya berusia di atas 18 tahun, yang berarti mencakup sekitar 79,5% dari total populasi. Pada Pemilu 2024, peran media sosial semakin menonjol sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi politik melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan TikTok. Keberadaan media sosial terbukti memiliki dampak besar terhadap proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

Media sosial berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik. Di samping itu, platform digital ini juga menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan isu dan agenda Pemilu 2024. Sekitar sepertiga pengguna media sosial mengakui bahwa informasi yang mereka peroleh melalui platform tersebut memengaruhi keputusan politik mereka. Tidak hanya sebagai saluran informasi, media sosial kini telah menjadi strategi kampanye politik yang efektif, memungkinkan pesan politik menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus mendorong

interaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Namun demikian, kampanye melalui media sosial tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan secara tidak etis, pesan-pesan politik yang berlebihan atau bersifat agresif justru dapat mencoreng citra kandidat.

Transformasi yang dibawa media sosial telah mengubah wajah kampanye politik secara menyeluruh, dari cara penyampaian pesan hingga pengaruhnya terhadap opini publik dan bahkan hasil akhir pemilu. Di sisi lain, dampak positif dari media sosial terlihat dari meningkatnya partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang sebelumnya kurang terlibat. Kampanye digital mampu menjangkau kelompok ini dengan lebih cepat dan menciptakan kesadaran politik yang lebih luas. Namun, di tengah kemajuan digital ini, muncul pula tantangan besar. Media sosial kerap menjadi medium penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga manipulasi opini. Kampanye hitam dan serangan personal terhadap kandidat sangat mudah viral di platform digital, sehingga memengaruhi persepsi masyarakat berdasarkan informasi yang belum tentu benar. Selain itu, algoritma media sosial cenderung menyajikan konten yang sejalan dengan pandangan pengguna, sehingga memperkuat polarisasi dalam masyarakat.

Konten yang tidak terverifikasi, bersifat provokatif, dan emosional lebih sering muncul dibandingkan informasi yang informatif dan faktual. Sebagai contoh, ketika seseorang mencari informasi tentang Pemilu 2024 di TikTok, algoritma platform tersebut bisa saja secara otomatis menampilkan lebih banyak konten terkait pasangan calon tertentu. Hal ini dapat menciptakan bias informasi karena pengguna tidak mengetahui apakah konten yang ditampilkan berdasarkan data faktual atau sekadar strategi kampanye. Bahkan, video yang muncul sering kali hanya potongan atau cuplikan, yang berpotensi disalahartikan oleh penonton.

Mengingat kondisi tersebut, penting untuk membekali masyarakat dengan kemampuan literasi digital yang memadai serta etika dalam bermedia sosial. Kesadaran untuk memverifikasi informasi dan bersikap kritis dalam menerima konten sangat dibutuhkan guna menciptakan ruang diskusi yang sehat serta mencegah penyebaran berita bohong dan provokasi. Pengguna media sosial diharapkan bijak dalam menyikapi setiap informasi, karena informasi yang tidak akurat dapat membentuk pemahaman keliru terhadap proses Pemilu 2024. Dalam rangka menciptakan pemilu yang damai dan sehat secara digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan inisiatif Kampanye Pemilu Damai 2024 sebagai bentuk edukasi dan penguatan peran media sosial dalam mendukung demokrasi yang bermartabat.

3.3 Mahasiswa dapat berperan dalam memberikan kontribusi pada pencegahan pemberian informasi palsu terhadap pemungutan suara pilpres (pemilu presiden) 2024.

Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran informasi palsu, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dalam konteks demokrasi digital yang semakin berkembang, mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai agen intelektual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu membentuk opini publik melalui media digital. Peran ini menjadi sangat penting mengingat maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi serta perilaku pemilih menjelang dan saat pemungutan suara.

Salah satu kontribusi nyata mahasiswa dalam mencegah penyebaran informasi palsu adalah melalui peningkatan literasi digital di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi secara kritis dan etis. Dengan membekali diri

dan orang-orang di sekitarnya dengan keterampilan ini, mahasiswa dapat membantu masyarakat membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan. Seperti yang dijelaskan oleh Wardani (2023), mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk berinteraksi, tetapi juga sebagai wadah edukasi dan klarifikasi terhadap isu-isu politik yang rawan disinformasi.

Lebih jauh lagi, mahasiswa memiliki akses terhadap berbagai sumber akademik dan jaringan organisasi yang dapat dijadikan alat untuk menyuarakan kebenaran dan mengkritisi narasi-narasi palsu yang berkembang. Kegiatan seperti diskusi publik, webinar, kampanye digital berbasis fakta, hingga produksi konten edukatif di media sosial menjadi bentuk konkret kontribusi mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan informasi yang sah. Selain itu, keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, lembaga pers mahasiswa, serta kolaborasi dengan lembaga independen pengawas pemilu seperti Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat memperkuat suara mahasiswa sebagai garda depan dalam menjaga integritas informasi pemilu.

Tidak kalah penting, mahasiswa juga harus bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima, termasuk dari tokoh politik, media, dan bahkan institusi resmi. Sikap kritis ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai kelompok terdidik yang diharapkan mampu menjadi panutan dalam proses demokrasi yang sehat dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh Ardianto dan Komalasari (2023) dalam jurnal Komunikasi politik di era disinformasi digital: Tantangan dan strategi generasi muda., peran aktif mahasiswa dalam mengedukasi dan mengoreksi informasi yang menyesatkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menangkal hoaks politik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu.

Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan penyebaran informasi palsu bukan hanya sebuah kontribusi individual, tetapi merupakan bagian dari peran kolektif untuk menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai lini, baik sebagai individu yang sadar informasi maupun sebagai bagian dari komunitas akademik, memperlihatkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat membentuk intelektual, tetapi juga ruang strategis dalam pembentukan kesadaran politik yang sehat.



Gambar 1. Media Youtube Tentang Waspada Hoax

Gambar yang ditampilkan merupakan tangkapan layar dari siaran berita Metro TV yang membahas topik “Waspada Hoax Jelang Pemilu 2024”. Tampak seorang presenter berita berdiri di samping layar besar yang menampilkan tulisan “Kawal Pemilu 2024” beserta gambar kotak suara bertuliskan logo KPU (Komisi Pemilihan Umum). Judul berita yang terpampang di bagian bawah layar menyampaikan peringatan mengenai penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024, yang menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Tertulis pula berita lain mengenai bencana di Meksiko Selatan, menambah konteks aktualitas tayangan tersebut. Tayangan ini berasal dari Metro TV, salah satu stasiun televisi nasional, dengan label siaran langsung dan jumlah pelanggan mencapai 10,6 juta. Gambar ini sangat relevan dengan judul tersebut karena menyoroti fenomena penyebaran hoaks politik menjelang Pemilu 2024, yang merupakan bentuk nyata dari disinformasi digital di era demokrasi modern. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran strategis dan vital sebagai agen perubahan dan penyaring informasi. Beberapa poin keterkaitannya adalah:

a. Mahasiswa sebagai Agen Literasi Digital:

Gambar ini memperlihatkan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks, yang menunjukkan bahwa media mainstream pun terlibat aktif dalam memberikan edukasi. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik seharusnya mengambil bagian dalam menyaring informasi, mengedukasi masyarakat, dan mengklarifikasi disinformasi yang menyebar di media sosial.

b. Pentingnya Kritis terhadap Informasi Politik:

Dalam suasana pemilu, hoaks kerap digunakan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Mahasiswa harus mengembangkan sikap kritis dan analitis dalam menanggapi informasi politik, serta menggunakan keterampilan digital untuk menelusuri kebenaran.

c. Mahasiswa sebagai Penggerak Sosial:

Informasi dalam gambar ini bisa dijadikan sebagai bahan kampanye sosial oleh mahasiswa untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap bahaya hoaks politik. Melalui media sosial, diskusi kampus, maupun kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa bisa menyuarakan pentingnya pemilu yang jujur dan informasi yang valid.

d. Wujud Partisipasi dalam Demokrasi Digital:

Era demokrasi digital menuntut partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari setiap warga, termasuk mahasiswa. Gambar ini menjadi simbol bahwa upaya menjaga pemilu bersih dari hoaks adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Gambar “Waspada Hoax Jelang Pemilu 2024” dari Metro TV ini dapat digunakan sebagai contoh nyata bahwa disinformasi politik adalah masalah serius yang harus dihadapi bersama. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat intelektual, dituntut untuk mengambil peran aktif dalam melawan hoaks melalui edukasi digital, literasi media, serta keterlibatan sosial demi terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membuka peluang besar dalam memperkuat partisipasi demokrasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi, khususnya menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Penyebaran informasi palsu melalui media

sosial yang massif dan cepat terbukti memengaruhi opini publik, terutama di kalangan pemilih muda. Rendahnya literasi digital di masyarakat menjadi faktor utama yang membuat hoaks politik mudah diterima tanpa verifikasi. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam melawan disinformasi politik. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai agen literasi digital dan agen perubahan sosial. Mereka memiliki keunggulan intelektual, akses terhadap informasi akademik yang kredibel, serta keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan mereka untuk menyaring dan memverifikasi informasi secara bijak. Mahasiswa mampu mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai saluran, baik melalui media sosial, kampanye anti-hoaks, produksi konten edukatif, hingga penyelenggaraan diskusi publik dan kolaborasi dengan lembaga pemilu atau lembaga pemeriksa fakta. Peran ini diperkuat dengan adanya studi dan data yang menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi pada mahasiswa berkorelasi dengan perilaku politik yang rasional dan kritis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran mahasiswa dalam melawan disinformasi politik di era demokrasi digital merupakan bagian integral dari upaya menjaga kualitas demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Mahasiswa menjadi ujung tombak dalam membangun masyarakat digital yang cerdas dan sadar informasi. Dengan begitu, kontribusi mahasiswa tidak hanya bersifat temporer menjelang pemilu, tetapi berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di era demokrasi digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E., & Komalasari, A. (2023). *Komunikasi politik di era disinformasi digital: Tantangan dan strategi generasi muda*. Jurnal Komunikasi Digital, 5(2), 78–89.
- Hidayat, A. W. A. (2024). *Literasi digital dan efikasi politik mahasiswa: Studi kasus pada perilaku memilih generasi muda*. Universitas Negeri Malang. [Laporan penelitian tidak dipublikasikan].
- Irhamdika, R. (2022). *Fenomena hoaks dan disinformasi dalam masyarakat digital*. Jurnal Komunikasi dan Informasi, 3(1), 45–53.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurgiansah, R. (2020). *Hoaks dan penanggulangannya dalam era digital*. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Setiani, D., & Tim Peneliti. (2022). *Peran mahasiswa dalam literasi digital dan pencegahan hoaks politik*. Universitas Muhammadiyah Bengkulu. [Laporan penelitian].
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, S. A. (2023). *Peran generasi muda dalam menangkal disinformasi melalui media sosial*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(1), 33–40.
- Data Reportal. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. We Are Social & Meltwater. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- HIVE Telkom University. (2023, November 15). *Deklarasi anti-hoaks dan literasi digital mahasiswa Telkom University*. <https://hivetelkomuniversity.ac.id>
- Kominfo. (2023, Oktober 23). *Kominfo temukan 11.642 konten hoaks di media sosial*. Kumparan. <https://kumparan.com>
- Kominfo. (2024, Januari 3). *Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024: Penanganan hoaks Pemilu 2024*. <https://kominfo.go.id>

Berliana Sihombing, Rika Chintia Sihombing, Najwah Laras Celia, Novellyn Debora Sitorus, Annisa Seftiawaty Damanik, Cristine Fitta Homasan Sinaga, Lismawati Junifarta, Prini desima evawani ambarita.
Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 1, No. 2, 2025, Hal 2088-2097

Metro TV News. (2024). *Waspada Hoax Jelang Pemilu 2024*. <https://www.metrotvnews.com> (dalam siaran Metro TV, tangkapan layar video YouTube Metro TV News) <https://youtu.be/377zffsoJdc?si=k0u7qhnDis4259v>